

Pendorong dalam Pengembangan Kurikulum PAI

Oleh M. Hajar Dewantoro^{*)}

Pendahuluan

Dalam menyukseskan pembangunan, bangsa Indonesia membutuhkan berbagai sumberdaya pembangunan dan salah satu yang terpenting di antaranya adalah *Sumber Daya Manusia* (SDM). Dalam hal ini, pembangunan membutuhkan SDM yang berkualitas dan diharapkan dapat menunjang kelancaran proses pembangunan. Untuk itu, pemerintah telah berupaya melakukan pembangunan di bidang pendidikan sebagai penyedia SDM yang berkualitas. Ini terlihat misalnya dengan penetapan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pembinaan tenaga kependidikan, melengkapi fasilitas pendidikan, termasuk juga ditetapkannya Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Sisdiknas).

Namun demikian, dalam kenyataannya kondisi pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Paling tidak itulah gambaran yang bisa diambil dari Peta Pendidikan Versi Koalisi Pendidikan. Koalisi yang terdiri atas *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Kelompok Kajian Studi Kultural* (KKSK), *Federasi Guru Independen*

Indonesia (FGII), *Institute for Education Reform* (IER), *National Education Watch* (NEW), dan Kapal Perempuan. Pada awal bulan November 2004, mereka bertemu dengan Mendiknas dalam rangka mendiskusikan program pendidikan lima tahun ke depan. Penyelenggaraan pendidikan nasional dinilai masih belum bergerak pada hal yang mendasar. Rusaknya ribuan bangunan sekolah, banyak warga yang belum dapat mengakses sekolah, masalah kualitas dan kuantitas guru, dan kurikulum yang terlalu berat (*Republika*, 19 November 2004).

Rendahnya kualitas SDM Indonesia tergambar juga dalam *Human Development Index* (HDI) 2004, yang dikeluarkan *United Nation Development Program* (UNDP). Posisi Indonesia berada pada posisi 111 lebih rendah dibanding tahun 2002 yang berada pada peringkat 110.

HDI tahun 2004 menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia lebih rendah dari SDM beberapa Negara tetangga, seperti Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina, (*Republika* 19 November 2004).

^{*)}Drs. M. Hajar Dewantoro, MSI., Dosen FIAI UII Yogyakarta

Human Development Index (HDI) 2002

HDI Rank	Negara	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2002
1	Norwegia	0.866	0.886	0.897	0.911	0.935	0.954	0.956
2	Swedia	0.863	0.873	0.885	0.895	0.928	0.943	0.946
3	Australia	0.847	0.864	0.877	0.892	0.932	0.942	0.946
25	Singapura	0.724	0.761	0.784	0.821	0.859	0.902	---
33	Brunei	---	---	---	---	---	---	0.867
59	Malaysia	0.614	0.657	0.693	0.720	0.759	0.789	0.793
76	Thailand	0.613	0.651	0.676	0.707	0.742	---	0.768
83	Filipina	0.653	0.686	0.692	0.719	0.735	---	0.753
111	Indonesia	0.467	0.529	0.582	0.623	0.662	0.680	0.692
112	Vietnam	---	---	---	0.610	0.649	0.686	0.691

Catatan : Semakin tinggi angka index semakin baik kualitas SDM

Sumber: Republika 19 November 2004, berasal dari laporan UNDP 2004.

Identifikasi Masalah

Masalah-masalah pendidikan di Indonesia dan rekomendasinya yang dilansir Harian *Republika* (19 November 2004) adalah :

1. *Mahalnya biaya pendidikan.* Tindakan yang harus dilakukan : menaikkan anggaran pendidikan, membebaskan beaya pendidikan dasar, meningkatkan subsidi untuk pendidikan menengah dan tinggi, menghapuskan segala pungutan di sekolah yang tidak ada korelasi dengan peningkatan mutu pendidikan.
2. *Korupsi dana pendidikan.* Tindakan yang harus dilakukan : mempublikasikan dan memper-tanggungjawabkan/melaporkan kebijakan dan proyek di Depdiknas, Dinas-Dinas pendidikan, dan sekolah kepada masyarakat melalui media massa, menindak tegas penyelenggara pendidikan/birokrasi yang melakukan korupsi dana pendidikan, dari tingkat Depdiknas, dinas-dinas pendidikan, sampai di sekolah/satuan pendidikan, membuat sistem pemilihan kepala

sekolah secara langsung, objektif dan transparan.

3. *Manajemen pendidikan.* Tindakan yang harus dilakukan : meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan pendidikan.
4. *Manajemen sekolah.* Tindakan yang harus dilakukan : mengembangkan demokratisasi dalam penyelenggaraan sekolah, memperbaiki sistem pemilihan kepala sekolah.
5. *Komite sekolah.* Tindakan yang harus dilakukan : menghilangkan fungsi mencari pendanaan dari orang tua siswa.
6. *Kurangnya fasilitas sekolah.* Tindakan yang harus dilakukan : mencukupi fasilitas pembelajaran sesuai standar minimal pendidikan.
7. *Meningkatnya angka putus sekolah :* Tindakan yang harus dilakukan: melaksanakan Undang-Undang Sisdiknas mengenai wajib belajar secara konsisten dan konsekuen, meningkatkan subsidi untuk pendidikan menengah dan tinggi, menyelenggarakan

semua bentuk pendidikan menengah dan tinggi dengan sistem pembeayaan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

8. *Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)*. Tindakan yang harus dilakukan : refungsi dan restrukturisasi LPTK menuju spesialisasi guru setingkat master, menghilangkan *crash program* keguruan.
9. *Kesejahteraan guru*. Tindakan yang harus dilakukan : meningkatkan gaji dan atau insentif untuk guru, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.
10. *Profesionalisme guru*. Tindakan yang harus dilakukan : memberikan otoritas kepada guru dalam melaksanakan profesinya, memfasilitasi guru dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya.
11. *Sistem rekrutmen dan distribusi guru*. Tindakan yang harus dilakukan: melakukan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kompetensi, melakukan distribusi berdasarkan kebutuhan daerah dengan memberikan insentif yang sesuai dengan kondisi geografis.
12. *Diskriminasi status guru*. Tindakan yang harus dilakukan : menghapuskan diskriminasi status guru PNS, swasta, honorer, kontrak, Bantu, relawan, dengan membangun sistem manajemen guru dalam satu kesatuan yang tidak diskriminatif.
13. *Birokratisasi profesi guru*. Tindakan yang harus dilakukan : menghapus sistem birokrasi yang

dapat menghambat kemandirian/otoritas guru, memberikan kebebasan kepada guru untuk berserikat, menyatakan pendapat, dan menjamin peran serta guru dalam pemberantasan KKN, khususnya pemberantasan korupsi dana pendidikan.

14. *Sistem evaluasi belajar*. Tindakan yang harus dilakukan : menyerahkan sistem evaluasi belajar dan penentuan kelulusan kepada sekolah/guru.
15. *Kurikulum*. Tindakan yang harus dilakukan : memfokuskan (arah kurikulum yang operasional dan terukur berdasarkan) pada kebutuhan siswa, merampingkan kurikulum sesuai dengan fokus yang ditetapkan, memberikan wewenang kepada guru untuk mengembangkan kurikulum 2004 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan guru dan sekolah (Republika, 19 November 2004).

Fokus Bahasan

Uraian berikut difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan, khususnya mencari tahu pendorong pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Tujuannya adalah untuk mencandra hal ikhwal pendorong yang memicu dan dasar-dasar pertimbangan yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum PAI.

Harapannya, dapat bermanfaat bagi pengembangan kurikulum PAI di sekolah-sekolah mengingat mulai tahun 2004 lalu, seluruh sekolah telah menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang kemudian disebut Kurikulum 2004, termasuk mata pelajaran PAI. Juga bermanfaat

sebagai pedoman bagi guru agama Islam untuk meningkatkan profesionalismenya khususnya dalam penerapan kurikulum baru tersebut.

Pendorong Pengembangan Kurikulum

Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum, di antaranya adalah faktor perubahan konstalasi politik, faktor perkembangan IPTEK, faktor perkembangan dinamika sosial dan faktor globalisasi.

1. Faktor Konstalasi Politik.

Setiap negara mempunyai cita-cita bangsanya. Cita-cita tersebut mempengaruhi arah pendidikannya. Cita-citanya tercermin dalam tujuan pendidikan dan kebijakan-kebijakan pendidikannya. Omar Mamalik (1990: 44) menyatakan bahwa sebagaimana negara lainnya, negara kita juga mempunyai tujuan pendidikan nasional yaitu "membentuk manusia pembangunan yang berpancasila dan membentuk manusia sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggungjawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi, dapat megembangkan sikap tenggangrasa dan mengembangkan kecerdasan yang tinggi serta berbudi pekerti yang luhur, mencintai bangsa dan sesama manusia. Tujuan pendidikan nasional merupakan produk politik yang tercantum dalam UU Sisdiknas, dimana UU tersebut ditelorkan oleh DPR dan Presiden.

Faktor politis berpengaruh pada dunia pendidikan, karena ketika terjadi perubahan haluan politik suatu negara bahkan dunia, maka diperlukan perubahan sistem pendidikan dan pembaharuan kurikulum. Perubahan haluan politik yang biasa terjadi seperti : dari kolonialis ke pemerintahan berdaulat, dari orde lama ke orde baru dan orde reformasi, dari partai demokrat ke parta republik, dari sentralisasi ke otonomi daerah

Apabila kita menelaah dokumen-dokumen resmi, semenjak awal kemerdekaan sampai dewasa ini, kita mendapati bahwa pelaksanaan pendidikan agama di sekolah selalu masuk dalam agenda pembahasan yang menjadi isu politik. Rapat Badan Pekerja Komite Nasional (BPKNIP) tanggal 27 Desember 1945 merekomendasikan agar pendidikan agama mendapat tempat yang teratur, seksama dan mendapat perhatian semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan kepercayaan yang dipeluknya.

Sebagai respon terhadap rekomendasi tersebut, maka pada bulan Maret 1946 diputuskan sebagai berikut : Hendaknya pelajaran agama diberikan pada semua sekolah pada jam pelajaran mulai kelas IV dan guru agama disediakan oleh Kementrian Agama dan dibayar oleh pemerintah, guru agama harus mempunyai pengetahuan umum, tidak perlu bahasa Arab.

Pada masa Orde Baru perhatian pemerintah semakin

kuat yaitu mendorong dan meletakkan dasar yang kuat bagi upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan serta pertumbuhan moral dan akhlak generasi muda. Dengan kelebihan dan kekurangannya, ini sangat dirasakan dalam dunia pendidikan dan masyarakat luas. Juga adanya himbauan Presiden pada MUI untuk membantu penyelenggaraan pesantren kilat untuk mengisi hari-hari libur panjang siswa. Pencanangan gagasan tersebut bahkan dilakukan sendiri oleh Presiden RI waktu itu di Istana Negara tanggal 14 Juni 1996. Ini merupakan salah satu bukti tentang betapa besar perhatian pemerintah terhadap peningkatan keimanan dan ketakwaan serta pembentukan moral generasi muda.

Dalam GBHN 1993, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi (Marwan Sarijo, 1998 : 60). Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, kedudukan pendidikan agama bahkan menjadi sangat kuat dan proporsional di mana anak didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang diajarkan oleh guru yang seagama. Untuk itu, kewajiban pemerintahlah untuk memenuhi hak siswa tersebut.

2. Faktor Perkembangan Iptek

Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada saat ini sangat membantu dalam proses pembelajaran, terutama sebagai

sarana atau media dalam mengantarkan pembelajaran dalam pencapaian tujuan. Perkembangan IPTEK juga ikut mendorong adanya perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum itu di antaranya diarahkan pada perubahan isi kurikulum dan strateginya. Perkembangan IPTEK adalah ditemukannya teknologi baru, ditemukan teori baru dan ditemukan metode baru. Termasuk juga perkembangan ilmu-ilmu dirasat islamiyah yang terjadi dalam sejarah.

Perkembangan dirasat islamiyah di Indonesia dapat dirunut sebagai berikut yaitu *pertama*, tahun 1950. Pada tahun 50-an, apa yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam adalah *Ulumuddin*, yaitu yang meliputi Kalam, Fiqh, Falsafat, Hadis, tasawuf. *Kedua*, tahun 1951-1975. Tahun 51-75 berkembang lagi menjadi *Islamic studies* yang dikaitkan dengan humanitis, *social science* dan *natural science*. *Ketiga*, tahun 1976-1995. Tahun 76-95 *Islamic studies* dikaitkan dan didekati sekaligus dikontekskan dengan ilmu lain. Fungsi ilmu lain itu sebagai *Auxiliary Sciences*. *Keempat*, tahun 1995-sekarang. Dalam tahun-tahun belakangan ini, *Islamic studies* betul-betul dikawinkan dengan ilmu sosial, ilmu budaya/humanitis, dan ilmu eksakta. Untuk menyahuti perkembangan ilmu keagamaan di atas, maka UIN Sunan Kalijaga merefleksikannya dalam paradigma kurikulum jaringan laba-laba yang dapat mengurangi ketegangan dikotomi keilmuan.

3. Faktor Dinamika Sosial

Ledakan pendudukpun ikut mempengaruhi perlunya perubahan kurikulum. Perubahannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan penduduk yang ada. Ledakan penduduk bisa jadi karena terjadi pertumbuhan penduduk, terjadi migrasi pen-

duduk, Pendidikan dan kesehatan membaik, ekonomi meningkat, dan demokratisasi di bidang sosial. Dinamika sosial dapat dilihat dari karakteristik masing-masing kluster sosial tradisional, sosial transisi, dan sosial modern. Hal ini dapat dipetakan sebagai berikut:

Perkembangan Dinamika Sosial Keagamaan

No	Tradisional	Transisi	Modern
1	Berorientasi pada masa lampau	Berorientasi pada masa kini	Berorientasi pada masa depan
2	Menyerah pada takdir	Percaya pada masyarakat dan Negara	Percaya pada diri sendiri
3	Gaya hidup konservatif	Gaya hidup adaptif	Gaya hidup kreatif
4	Kekuatan spiritual berpengaruh kuat	Kekuatan sosial dan pemerintah berpengaruh kuat	Kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh kuat
5	Masyarakat stabil, hampir stagnan, menolak inovasi (termasuk faham agama)	Masyarakat stabil, terbuka terhadap informasi luar, dan bersedia menerima inovasi	Masyarakat dinamis, suka mencipta dan menyebarkan informasi, selalu inovatif
6	Usaha hidup tanpa planning	Usaha hidup dengan shortterm planning	Usaha hidup dengan longterm planning
7	Sosial kontrol sangat kuat	Collective control yang kuat	Formal kontrol yang kuat

4. Faktor Globalisasi

Globalisasi menggambarkan keadaan dunia menjadi satu kesatuan. Bagi umat Islam, kondisi ini tidak jadi soal, karena cita-cita Islam adalah *umatan wasathan* yang berdiri tegar di antara umat lainnya. Sisi yang menjadi problem adalah isu-isu yang diusung oleh globalisasi, yaitu seperti isu hak azasi manusia, isu demokrasi politik, isu demokrasi ekonomi dan lain-lain. Ternyata sekularisasi itu tidak hanya memisahkan agama dengan urusan dunia, tetapi berkembang memisahkan politik dari dunia ekonomi. "Agama silahkan anda urusi, politik silahkan anda kuasai", asal bisa diatur atau *friendly market*, tetapi urusan ekonomi serahkan pada saya, begitulah kira-kira pikiran yang muncul dari globalisasi. Khusus bidang IPTEK muncul Istilah *Science and Technology Impperialisme* (Malik Fajar, 2001 : 10-15).

Namun pada akhirnya adalah terciptanya hegemoni dunia oleh segelintir bangsa atas bangsa-bangsa lainnya. Seperti hegemoni politik oleh Negara maju atas Negara berkembang, hegemoni ekonomi oleh kapitalisme atas sistem lainnya (Kartini Kartono, 1977 : 165-180). Belakangan datang model ekonomi Islam sebagai penyempurna kelemahan ekonomi kapitalistik.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, maka isu global lainnya di dunia pendidikan adalah peningkatan SDM yang mengusung isu *Human*

Centred Development, Education for all and All for education, Empowerment, dan learning without frontier (Malik Fajar, 2001:10-15).

Azas Pengembangan Kurikulum PAI

Sebagai suatu sistem, kurikulum mempunyai beberapa bagian yang saling terkait dan padu. Bagian-bagian dari sistem kurikulum itu disebut komponen kurikulum. Seperti yang telah dikemukakan di atas, kurikulum PAI memuat sejumlah pengalaman belajar, kegiatan dan pengalaman yang dirancang untuk membentuk pribadi muslim, maka kurikulum tersebut disusun sedemikian rupa untuk memenuhi tuntutan di atas. Dalam kurikulum 2004, komponennya meliputi Kurikulum dan Hasil Belajar (KHB), Penilaian Berbasis Kelas (PBK), Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dan Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah (PKBS).

Perlu juga diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan mewarnai wajah kurikulum. Masing-masing faktor bisa mempengaruhi satu atau beberapa komponennya. Faktor yang ikut mempengaruhi warna kurikulum itu disebut azas-azas kurikulum. Oleh karenanya, sebelum membahas komponen kurikulum, akan dibahas terlebih dahulu azas-azas kurikulum.

Terdapat empat azas pengembangan kurikulum yang selalu menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum. Keempat azas tersebut adalah : Azas Filosofis, Azas Sosiologis, Azas Psikologis dan Azas Organisatoris (Nasution :21, Iswahyudi dan Usman : 26-60). Bagi kurikulum PAI, perlu ditambah azas Islam. Aspek

filosofis dimaksudkan untuk menggambarkan manusia ideal sesuai dengan pandangan hidup masyarakatnya. Aspek agamis, dimaksudkan agar tujuan pendidikan sesuai dengan kehendak agama Islam, karena pada dasarnya, kepribadian muslim merupakan cita-cita global pendidikan Islam dan kesemuanya itu harus tercermin dalam tujuan pendidikannya. Aspek sosiologis, maksudnya adalah subyek didik diarahkan untuk dapat hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Aspek psikologis, maksudnya bahwa pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental dan pertumbuhan jasmaniahnya yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek organisatoris dimaksudkan untuk mengatur ruang lingkup dan sistematika keilmuan yang akan diajarkan di kelas.

Mengingat perkembangannya yang begitu pesat belakangan ini, maka perlu dipertimbangkan aspek iptek untuk memberi bekal subyek didik untuk terus dapat mengikuti perkembangan dan dapat mengembangkan iptek di masa depan. Untuk pengembangan Kurikulum PAI bagi penyelenggaraan pendidikan agama ke depan, dapat dimulai dengan merumuskan:

1. Azas Tauhid

Kedudukan kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai pengemban pencapaian tujuan pendidikan yang memuat sejumlah pengalaman belajar. Kegiatan pengalaman belajar tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga terbentuklah pribadi muslim yang berkualitas.

Untuk melihat tujuan kurikulum yang baik, diperlukan pertimbangan untuk menganalisisnya, yaitu pertimbangan falsafah, agama, sosial, psikologis dan iptek.

Kurikulum hendaknya dapat menggambarkan profil subyek didik baik dalam pengetahuan maupun dalam sikap dan perilaku yang harus diperoleh selama masa pendidikan. Hakekat dan struktur keilmuan yang dirumuskan dalam kurikulum harus disandarkan pada agama Islam, agar mempunyai dasar keilmuan yang kokoh. Oleh karena itu, tauhid hendaknya dijadikan nafas penyusunan kurikulum. Dalam konsep dan pelaksanaan kurikulum PAI, semua aspek harus diletakkan dan dipadukan dengan tetap berporos pada nilai-nilai Islami.

Kurikulum PAI dengan azas Islam haruslah mengandung nilai-nilai Iman (agidah), Islam (syariah), dan Ikhlas (akhlak), yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui ibadah (hubungan vertikal) dan muamalah (hubungan horisontal). Tujuan PAI antara lain sebagaimana yang menjadi sasaran syari'ah Islamiyah, yaitu : menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta, yang ke semuanya dimaksudkan demi kemaslahatan umat manusia. Kurikulum PAI bertujuan untuk mewujudkan dan membentuk pribadi muslim yang berakhlak Al-Quran, yang mengembangkan kehidupan

yang direalisasikan dalam setiap aktivitas hidupnya.

2. Azas Filosofis

Maksud dari didirikannya sekolah adalah untuk mendidik siswa agar menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik dirumuskan dalam tujuan sekolah yang kemudian disebut tujuan pendidikan. Gambaran manusia yang baik serta rumusan tujuan pendidikan di atas, dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma-norma, cita-cita dan pandangan hidup yang dianut oleh para pendidik, para pengelola sekolah, para orang tua siswa, masyarakat dan negara.

Oleh karenanya, maka perbedaan pandangan hidup akan menimbulkan perbedaan dalam menentukan tujuan pendidikan dan materi pelajaran yang direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, negara kolonial tentu berbeda dengan negara merdeka, pemerintahan yang demokratis tentu berbeda dengan yang otoriter, masyarakat sekuler tentu berbeda dengan masyarakat yang agamis. Gambaran ini menandakan bahwa falsafah sangat mempengaruhi kurikulum, dan dalam pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan azas filosofis ini.

Landasan filosofis pendidikan Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, landasan filosofis Pancasila sebagai dasar pengembangan kurikulum. Pancasila dapat dipandang relevan untuk penerapan filosofi pendidikan yang mendunia

seperti empat pilar belajar (Delor, 1997): belajar menjadi diri sendiri, belajar mengetahui, belajar melakukan, dan belajar hidup dalam kebersamaan (*Dokumen Diknas*, 2002, "Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah").

Bidang-bidang pembicaraan falsafah meliputi : Metafisika : apakah hakekat kenyataan/realitas ? Epistemologi : apakah hakekat pengetahuan ? Aksiologi : apakah hakekat nilai ? Etika : apakah hakekat kebaikan ? Estetika : apakah hakekat keindahan ? Logika : apakah hakekat penalaran ? (Nasution, 1989: 14).

Oleh karena itu, kerangka falsafah di atas selalu mewarnai corak kurikulum yang dikembangkan. Falsafah hidup perencanaan kurikulum, pendiri lembaga pendidikan, staf edukatif dan staf administratifnya, semuanya ikut mentalwin celupan kurikulum pendidikannya. Kita sebagai bangsa Indonesia tentu saja falsafah Pancasila tidak boleh lepas dari pertimbangan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Kita sebagai muslim, tentu saja mengedepankan pandangan hidup Islam, baik dalam cara berfikir, cara merasa, cara meyakini dan cara bertindak yang Islamipun jangan sampai tidak menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa falsafah itu menjadi salah satu azas pengembangan kurikulum pendidikan.

3. Azas Sosiologis

Subyek didik sebagai insan mono-dualis. Maksudnya, di samping sebagai individu, ia juga sebagai makhluk sosial. Ia akan hidup di tengah-tengah masyarakat dan mengaktualisasikan potensi dirinya untuk memajukan masyarakat. Masyarakat itu mempunyai nilai, norma, tradisi, cita-cita di mana hal itu semua harus diketahui dan diperhatikan oleh subyek didik dalam hidupnya. Dengan demikian faktor sosiologis ini tidak bisa diabaikan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum yang memperhatikan kepentingan sosial ini disebut *Society Centered Curriculum*.

Kurikulum merupakan refleksi dari kebudayaan di mana kurikulum itu berada. Unsur pokok kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adalah alat dan lembaga pendidikan, organisasi ekonomi, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat agar menguasai alam sekitarnya, Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (misalnya pakaian, perumahan, pangan, transportasi dan seterusnya), sistem kemasyarakatan (misalnya sistem hukum, sistem perkawinan, organisasi politik dan seterusnya), bahasa (lisan/tulis), kesenian (misalnya seni lukis, seni suara, seni kaligrafi, dan seterusnya), sistem pengetahuan, Religi (sistem kepercayaan) (Iskandar dan Usman, 1988: 37-38).

4. Azas Psikologis

Secara psikologis, subyek didik itu mempunyai kepribadian unik yang berbeda satu dengan lainnya. Keunikan itu terdapat dalam jiwa dan dalam cara belajarnya, yang keduanya terkait erat dengan psikologi. Subyek didik adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Secara biologis, fisiknya masih mengalami masa-masa pertumbuhan dan secara psikologis sedang mengalami perkembangan. Jadi pada diri anak itu terdapat pertumbuhan jasmani dan perkembangan jiwa. Kurikulum perlu memperhatikan hal ini agar muatan kurikulum bersesuaian dengan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sebagai subyek didik, anak juga diperhatikan dalam pengajaran, apa saja yang pantas diajarkan dan bagaimana cara belajarnya. Ini penting menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Artinya dalam pengembangan kurikulum perlu mempertimbangkan dasar-dasar psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Kurikulum yang memperhatikan kepentingan anak ini disebut *child centered curriculum*.

Dalam teori belajar *behavioristik* dinyatakan bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh *reward* (ganjaran) dan *re-inforcement* (penguatan) dari lingkungannya. Dari konsep itu muncul rumus *S-R psychologists* (Iskandar dan

Usman, 1988 : 45). S :stimulus dan R : respon. Orang melakukan sesuatu (respon) karena ada rangsangan dari luar (stimulus). Pendangan ini dapat dimanfaatkan oleh guru dalam mendesain dan pelaksanaan kurikulum.

Teori belajar *kognitif* menyatakan bahwa tingkah laku manusia itu didasarkan pada kognesi yaitu tindakan mengenal, memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi itulah seseorang memperoleh "insight" untuk memecahan masalah. Tingkah lakunya itu bergantung pada "insight" terhadap relasi yang ada dalam situasi sekitar (Iskandar dan Usman, 1988 : 46).

Lain lagi bagi golongan Humanistik, yang menyatakan bahwa seseorang itu menentukan perilakunya sendiri. Ia bebas memilih kualitas hidupnya, tidak terikat oleh lingkungannya. Penyusunan dan penyajian pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa (Iskandar dan Usman, 1988 : 46)

5. Azas Organisatoris

Organisasi kurikulum berfungsi untuk menata struktur program yang direncanakan, yang mencakup luas (*scope*-nya), urutan (*sequence*-nya) dan relasi antar bidang studi. Organisasi kurikulum ini terdapat lima model yaitu *separate subject curriculum*, *correlated curriculum*, *integrated curriculum*, *developmental activity curriculum* dan *core curriculum*.

Kata Akhir

Dari uraian di atas, maka dipahami bahwa faktor pendorong dalam pengembangan kurikulum dengan azas pengembangannya yang konkret, terpulang kembali pada guru agama itu sendiri. Ini mengingat bahwa mereka dalam keberadaannya sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum di kelas, sehingga pengembangannya dapat dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhannya.

Oleh karena itu, sekarang tinggal memberikan wewenang kepada mereka, karena pada dasarnya gurulah yang berhak merencanakan dan melaksanakan kurikulum. Kurikulum bukan hanya yang tertulis, tetapi juga yang aktual yaitu rencana kurikulum yang harus direalisasikan. Lebih dari itu, bahwa guru sendiri merupakan bagian dari kurikulum dan pola fikir serta tingkah laku guru, merupakan suatu hal yang ikut mewarnai kurikulum.***

Kepustakaan

B. Suryo Subroto. *Dinasti Dimensi Administrasi dPendidikan di Sekolah*. (Jakarta: Bina Aksara, 1988).

Djamil Latif. *Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Pendidikan Agama*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan PAI pada Sekolah Umum Negeri, 1983).

Iskadar Wiryokusumu dan Usman Mulyadi. *Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum*. (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988).

- Kurikulum Pendidikan Dasar. (Jakarta: Depag RI, 1997).
- Kurikulum Pendidikan Dasar Bercirikan Agama Islam. (Jakarta: Depag RI, 1994/1995).
- Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan. (Jakarta: Depag RI Dirjen Bimbaga Islam, 1994).
- Kartini Kartono. *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Beberapa Kritik dan Sugesti*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977).
- Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Tsanawiyah. (Jakarta: Depag RI Dirjen Bimbaga Islam, 1993/1994).
- Masduki (editor). *Modernisasi Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Peniti Refressing Course GA, 1964).
- Mudhofir. *Teknologi Instruksional*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994).
- Muhammad Zein. *Azas dan Pengembangan Kurikulum*. (Yogyakarta: Sumbangsih, 1985).
- Malik Fajar. *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengajaran Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Logos, 2001).
- Nana Sujana. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. (Bandung: CV Sinar Baru Bandung dan IKIP Bandung, 1991).
- Oemar Mamalik. *Pengembangan Kurikulum*. (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Petunjuk Palaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar PAI di SD. (Jakarta: Depdikbud, 1994/1995).
- S. Nasution. *Azas Azas Kurikulum*. (Bandung: Jemmars, 1990).
- . *Kurikulum dan Pengajaran*. (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984).
- . *Teknologi Pendidikan*. (Bandung: CV Jemmars, 1982).
- Subandijah. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Yusufhadi Miarso. *Teknologi Komunikasi Pendidikan Pengertian dan Penerapannya di Indonesia*. (Jakarta: CV Rajawali, 1986).
- Winarno Surachmad (Ed.). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. (Jakarta: Derjen Dikdasmen Depdikbud, 1877).